

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arizona, Y. (2010). *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Sajoeto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. Epistema Institute.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan* (1st ed.). Setara Press.
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjiono, M. J. (2018). *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (1st ed.). Kafilah Publishing.
- Hidayatullah. (2021). *Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Ismail, Z. (2023). *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Joesoef, I. E. (2021). *Teori Hukum (Dogma-Teori-Filsafat)* (1st ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (2nd ed.). PT Alumni.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga Universitas Press (AUP).

- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi: Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (R. Azmi (ed.); 1st ed., Vol. 1). PT Nusantara Persada Utama
- Waluyo, B. (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (Warsito (ed.); 1st ed.). Reviva Cendekia.
- Yadiman, H., & Melani. (2021). *Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd ed.). Lekkas.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama di Tahun 2011

DPR. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*.
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160108-112705-3009.pdf>

C. Jurnal

Alun Gunawan, D., Naufal Mumtaz, R., & Alief Dandi Fuadi, M. (2023). Jurnal Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia. In *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Issue 5).

Atapary, A. E., Pasalbessy, J. D., & Wadjo, H. Z. (2023). Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 28–45.
<https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9049>

Jainah, Z. O. (2013). KEJAHATAN NARKOBA SEBAGAI FENOMENA DARI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. *PRANATA HUKUM*, 8(2), 95–103.

Lumangkun, J. (2017). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UITLOKKING (PENGANJURAN) BERDASARKAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex et Societatis*, 5(1), 19–26.

- Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 207–213.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203–222.
- Nengsih, Y. (2019). GAMBARAN FAKTOR PREDISPOSISI, PERAN ORANGTUA DAN LINGKUNGAN SOSIAL REMAJA YANG MENGGUNAKAN NARKOBA DI RSKO JAKARTA TIMUR TAHUN 2018. *Jurnal Kesehatan Dan Kebidanan STIKes Mitra RIA Husada*, 8(2), 1–10.
- Prayogo, R. T. (2016). PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 13(6), 191–202.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142.
- Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE

LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 1(1), 163–172.

D. Website

BBC. (2022). Penangkapan perwira polisi kasus narkoba di Karawang, ‘Kasus berulang, ada yang salah di internal Polri.’ *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0pd1zpkz1o>, diakses pada tanggal 26 November 2023

Sadya, S. (2023). *Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022>, diakses pada tanggal 26 November 2023